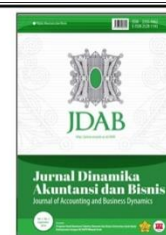


Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB) Journal of Accounting and Business Dynamics

URL: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/index>



Studi Tentang Teori GONE dan Pengaruhnya Terhadap *Fraud* Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan

Jaka Isgiyata^a, Indayani^{b*}, Eko Budiyni^c

^aUniversitas Diponegoro, ^bUniversitas Syiah Kuala, ^cPemerintah Kabupaten Kebumen

*Corresponding author: inya74@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.24815/jdab.v5i1.8253>

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 30 August 2017

Received in revised form: 19 December 2017

Accepted: 4 January 2018

Available online: 31 March 2018

Keywords:

GONE theory, leadership, government, procurement and fraud

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of GONE theory's variables on the procurement fraud of government goods/services by using variables of leadership idealism as a moderating variable. This study uses question instruments for each variable: Greed, Opportunity, Need, and Exposes from Bologne (1993), Leadership Idealism from Tappen (1994) and Procurement Fraud of Government Goods/Services. This study collects primary data gathered from the respondent's perception in Kebumen District Government agencies. The analysis technique used is Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study demonstrate that the existence of Exposes (low penalty level) and lack of leadership idealism will increase the potential procurement fraud of goods/services in government. In other words without the punishment that can provide a deterrent effect and less idealistic leadership will be more and more potential individuals within the bureaucracy associated in the procurement process of goods/services to conduct fraud.

©2018 FEB USK. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Korupsi tetap menjadi sorotan utama publik di Indonesia. Karyono (2002) menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah terjadi berulang kali pada sistem penyelenggaraan pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan fakta bahwa pada semester II tahun 2010 ditemukan sejumlah 1.513 kasus *fraud* dengan total kerugian sebesar Rp. 659 miliar pada pengadaan barang/jasa yang meliputi 146 kasus merugikan keuangan negara, 1.319 kasus merugikan keuangan daerah dan 6 kasus merugikan keuangan perusahaan BUMN, serta 42 kasus merugikan keuangan perusahaan BUMD. Pada tahun 2015, hasil laporan tahunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

menunjukkan bahwa KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 5 (lima) kali, melakukan 84 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 91 penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya, serta melakukan eksekusi terhadap 33 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Hardian, 2011; Transparency International, 2011, 2012, 2013).

Praktik-praktik kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi antara lain adalah penyalahgunaan kepentingan, penyuaipan, penerimaan yang tidak sah dan korupsi (Bologna, Lindquist, & Wells, 1993; Nugroho, 2015; Tuanakotta, 2010). Segon (2010) memberikan contoh riil *fraud* dalam bentuk

perilaku korup pejabat publik yang menerima hadiah dari orang pribadi dengan tujuan merangsang dia untuk memberikan pertimbangan yang menguntungkan untuk kepentingan pejabat publik dan menyajikan posisi yang tidak berimbang. Beberapa kasus *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia antara lain kasus Hambalang, kasus pengadaan Bus Trans Jakarta, kasus pengadaan E-KTP, dan kasus Simulator SIM. Meskipun berbagai jenis kasus *fraud* terungkap dan telah diproses oleh hukum, belum ada indikasi bahwa tindak kecurangan itu akan segera terhenti. Apakah karena sistem di negara kita yang mandul atautkah para pelaku yang selalu selangkah lebih maju (Hardian, 2011; Jatiningtyas & Kiswara, 2011; Musa, Othman, Ibrahim, & Din, 2012).

Indikator yang ada menunjukkan ukuran kerugian yang disebabkan tindakan *fraud* telah meningkat (Getie Mihret, 2014; Glover & Aono, 1995; KPMG, 2010). Asosiasi Survei Penguji Penipuan menunjukkan bahwa organisasi kehilangan 5 persen dari pendapatan mereka setiap tahun yang disebabkan oleh penipuan. Asosiasi ini juga memperkirakan kerugian ekonomi global sebesar US\$3,5 trilyun. Selain itu, tingkat ketidakjujuran dalam masyarakat cenderung meningkat (Getie Mihret, 2014; Wilson, 2013).

Dewani & Chariri (2015) menyebutkan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia mengingatkan pada suatu konsep yang disebut *Capture Theory* dari Amle O Krueger. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa dalam *Capture Theory*, Amle O Krueger menegaskan segala sesuatunya di atas kertas secara yuridis formal adalah sah dan legal. Akan tetapi, pada tataran realitasnya teori ini banyak disalahgunakan untuk memuluskan kepentingan beberapa pihak. Alasan melakukan *fraud* tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari konteks sosial dan perilaku individu. Seperti banyaknya situasi individu dan sosial menjelaskan mengapa dan bagaimana *fraud* terjadi, eksposur risiko *fraud* tidak dapat diabstraksikan hanya sekedar sebagai bentuk konteks budaya penipuan

(Getie Mihret, 2014). Ramamoorti (2008) berpendapat bahwa factor perilaku merupakan akar dari permasalahan mengenai kecurangan (*fraud*).

Perilaku seseorang dalam melakukan tindak kecurangan disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya (Bologne, 1993; Dewani & Chariri, 2015). Para pelaku kecurangan biasanya menghadapi berbagai jenis tekanan dimana tekanan yang paling kuat adalah tekanan finansial, tekanan non finansial seperti tuntutan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, ataupun tantangan untuk melawan sistem (Albrecht, Albrecht, & Albrecht, 2004). Menurut *Oversights System Report on Corporate Fraud* (2007), alasan utama yang menyebabkan terjadinya *fraud* adalah adanya tekanan untuk memenuhi kebutuhan, untuk mendapatkan keuntungan, dan tidak menganggap apa yang dilakukannya adalah termasuk *fraud*.

Teori *Triangle Fraud* oleh Cressey (1953) menyebutkan terdapat tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan mengapa seseorang melakukan *fraud* atau tindak kecurangan yaitu adanya tekanan, peluang atau kesempatan, dan rasionalisasi. Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Vona (2008) yang menyatakan bahwa dalam teori penipuan untuk terjadinya penipuan perlu ada rasionalisasi, tekanan, dan peluang. AICPA telah menyebut ketiga unsur ini sebagai faktor risiko penipuan atau kondisi penipuan. Teori *GONE* merupakan penyempurnaan dari teori *Triangle Fraud* yang mengungkapkan mengapa seorang koruptor melakukan tindak *fraud* yang meliputi unsur *Greed* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Need* (Kebutuhan), *Exposes* (Hukuman yang rendah). Teori *GONE* adalah teori yang menyatakan alasan pelaku tindak pidana melakukan praktik *fraud*, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan Teori *GONE* ini merupakan hal yang tepat. Tuanakotta (2010) menyebutkan bahwa faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor individual yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, sedangkan

faktor *Opportunity* dan *Exposes* merupakan faktor generik/umum yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan.

Jika kecurangan atau *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah dikaitkan dengan idealisme pimpinan, Widayat (2014) menyebutkan bahwa pergeseran paradigma kepemimpinan ideal atau idealisme pemimpin menghantarkan sistem pengelolaan pemerintahan yang dihiasi kepentingan kekuasaan sehingga berdampak munculnya malpraktik kekuasaan berbasis kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Hal ini bisa disadari secara seksama bahwa kekuasaan yang kurang sehat memiliki kecenderungan untuk menghasilkan produk-produk manusia berjiwa oportunistik, tanpa memikirkan dampak negatif terhadap segala pemikiran, perbuatan, dan kebijakan yang dilakukan.

Penelitian mengenai *fraud* dengan menggunakan teori GONE masih terbatas terutama pada ruang lingkup pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh teori GONE terhadap *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dan apakah idealisme pimpinan memperlemah pengaruh dari *Greed* atau keserakahan, *Opportunity* atau kesempatan, *Need* atau kebutuhan, *Exposes* atau hukuman yang rendah terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini memberikan kontribusi pengaruh moderasi idealisme pimpinan pada teori GONE.

Selanjutnya, artikel ini disusun sebagai berikut, bagian kedua terkait dengan teori, *literature review*, kerangka konseptual dan hipotesis; kemudian metodologi penelitian; hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan, rekomendasi dan agenda penelitian mendatang.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Teori GONE adalah teori yang populer digunakan dalam penelitian *fraud*. Penelitian ini menggunakan teori GONE dari Jack Bologne (1993) sebagai dasar teori untuk meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku *fraud*. Teori GONE merupakan teori yang menyempurnakan

Teori *Triangle Fraud*, dimana kedua teori tersebut mengungkapkan alasan seorang koruptor melakukan tindak *fraud*. *Fraud Triangle Theory* merupakan teori yang meneliti tentang penyebab terjadinya *fraud* yang pertama kali ditulis oleh Cressey (1953) dan dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan. *Fraud triangle* menurut Cressey (1953) menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud* yang meliputi *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (Peluang), *Rationalization* (Rasionalisasi).

Teori GONE menyebutkan akar penyebab kecurangan terdiri dari empat faktor yaitu: *Greed*, *Opportunities*, *Need* dan *Expose*. *Greed* terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. *Opportunity* atau kesempatan terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi, yang berkaitan dengan keadaan organisasi/instansi atau lingkungan masyarakat yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Need* atau kebutuhan adalah sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai. *Exposes* sebagai hal yang berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah, hukuman yang tidak membuat jera pelaku maupun orang lain, dan *deterrence effect* yang minim.

Getie Mihret (2014) meneliti budaya nasional dan risiko *fraud* pada 66 negara. Variabel independen budaya nasional menggunakan lima dimensi nilai budaya Hofstede and Hofstede (2005) dan *fraud* sebagai variabel dependennya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa risiko *fraud* tinggi ada pada negara dengan budaya jarak kekuasaan yang lebar dan budaya orientasi jangka panjang yang terbatas seperti Indonesia. Pada konteks Indonesia beberapa peneliti seperti (Dewani & Chariri, 2015; Jatiningtyas & Kiswara, 2011; Nugroho, 2015) yang mengamati *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Jatiningtyas & Kiswara (2011) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pada pengadaan

barang/jasa pemerintah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian terhadap penghasilan panitia, sistem dan prosedur, etika dan lingkungan pengadaan barang/jasa, antara panitia pengadaan dan auditor BPKP, kecuali pada kualitas panitia pengadaan barang/jasa.

Nugroho (2015) meneliti tentang Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) terhadap *fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menemukan bahwa sistem *e-procurement* berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah, sementara itu Dewani & Chariri (2015) meneliti modus pencucian uang di Indonesia. Fokus dari penelitiannya adalah untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan artis wanita. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa auditor pemerintah mengakui esensi pencucian uang sesuai dengan peraturan dan pendapat ahli. Artis wanita

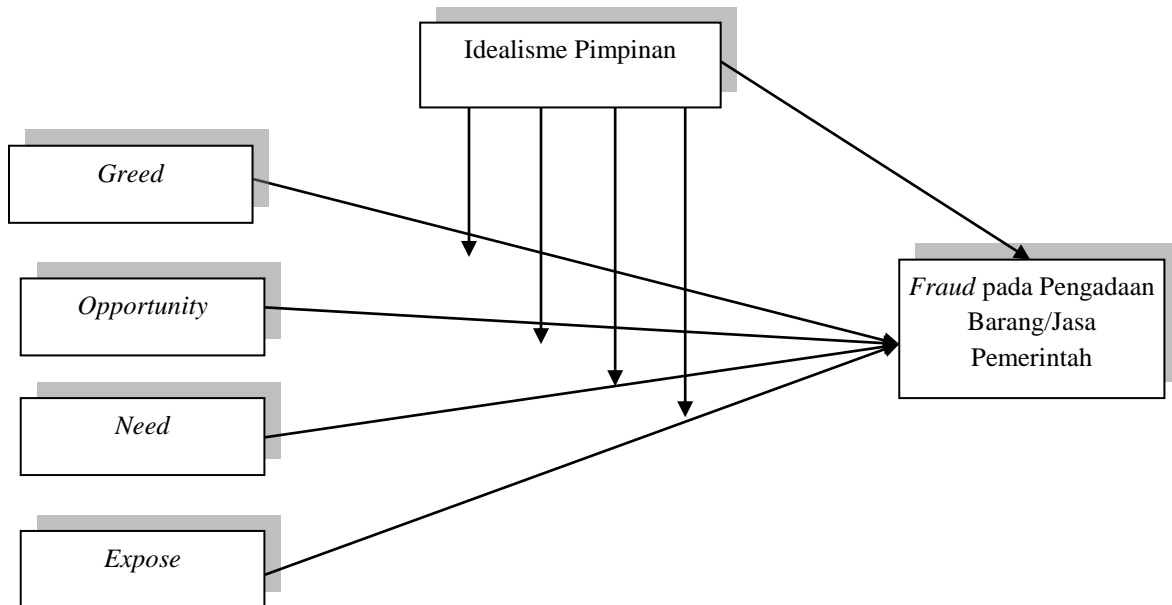
hanyalah korban atau mereka dilibatkan sebagai pemegang dana korupsi.

Zaini, Carolina, & Setiawan (2015) meneliti Pengaruh *Fraud Diamond* dan *Gone Theory* Terhadap *Academic Fraud*. Mereka menyatakan bahwa tidak semua faktor yang terdapat dalam *Fraud Diamond* berpengaruh terhadap *fraud* (faktor tekanan berpengaruh positif, sedangkan kemampuan dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap *academic fraud*), sedangkan Faktor *Gone Theory* berpengaruh terhadap *fraud* (keserakahan, kesempatan, dan *exposes* berpengaruh positif, sedangkan kebutuhan berpengaruh negatif terhadap perilaku *academic fraud*).

Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan nilai yang merepresentasikan esensi pengaruh teori *GONE* terhadap *fraud* dengan idealisme pimpinan sebagai variabel moderasi. Berikut ini merupakan gambar model penelitian:

Gambar1
Kerangka Penelitian



Pengembangan Hipotesis

Perilaku seseorang dalam melakukan tindak kecurangan disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Didalam Teori *Triangle*

Fraud yang dikemukakan Cressey (1953) terdapat tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan mengapa mereka melakukan *fraud* atau tindak kecurangan yaitu adanya tekanan, peluang atau

kesempatan, sedangkan didalam Teori *GONE* yang dikemukakan Bologne (1993) sebagai landasan dalam penelitian ini terdapat unsur *Greed* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Need* (Kebutuhan), *Exposes* (Hukuman yang rendah) yang dijadikan alasan seorang koruptor melakukan tindak kecurangan/*fraud*.

Greed atau keserakahan sebagai faktor yang pertama disebutkan sebagai penyebab terjadinya *fraud*. Faktor keserakahan cenderung membuat seseorang buta akan tindakannya, menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi hasrat materialnya Dewani & Chariri (2015), sehingga semakin tinggi tingkat keserakahan seseorang maka semakin tinggi pula potensinya untuk melakukan tindakan *fraud*.

Ha1: *Greed* berpengaruh secara positif terhadap perilaku kecurangan/*fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bologne (1993) menempatkan faktor *opportunity* atau kesempatan sebagai faktor yang kedua disebutkan sebagai penyebab terjadinya *fraud*. Kesempatan merupakan bagian penting dari setiap pekerjaan *fraud* karena kesempatan dianggap faktor pemicu terjadinya kecurangan atau *fraud* (Albrecht et al., 2004). Kesempatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan atau *fraud*. Oleh karena itu semakin tinggi kesempatan untuk melakukan *fraud* maka semakin tinggi pula potensi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*.

Ha2: *Opportunity* berpengaruh secara positif terhadap perilaku kecurangan/*fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Terkait dengan faktor *need* atau kebutuhan adalah faktor ketiga terjadinya *fraud* (Bologne, 1993), setiap orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lebih sehingga dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhannya

meskipun harus dengan melakukan kecurangan sekalipun. Semakin tinggi tingkat kebutuhan maka semakin tinggi pula potensi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*.

Ha3: *Need* berpengaruh secara positif terhadap perilaku *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hukuman yang rendah (*exposes*) adalah hal yang berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan (Dewani & Chariri, 2015). Hukuman yang rendah (*exposes*) belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Semakin rendah tingkat hukuman maka semakin tinggi pula potensi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*.

Ha4: *Exposes* berpengaruh secara positif terhadap perilaku *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tappen, Davis, & Tradewell (1995) menyebutkan bahwa idealisme pimpinan pada dasarnya terkait dengan karakter pemimpin yang ideal dimana seorang pemimpin mampu menjalankan kekuasaannya secara efektif dan efisien, sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya. Idealisme pimpinan yang demikian cenderung berani beragumen dengan pendapat yang berbeda, meskipun dianggap berbeda tetapi tetap percaya diri, cenderung optimis dan memiliki pemikiran yang positif, dan berani mengambil segala risiko atas keputusannya. Selanjutnya, Tappen et al. (1995) menyatakan bahwa pemimpin yang demikian harus memenuhi syarat-syarat memiliki pengetahuan (*knowledge*), memiliki kesadaran diri (*self awareness*), komunikatif, memiliki energi, memiliki tujuan yang jelas, dan berorientasi pada tindakan/*action*. Semakin tinggi tingkat idealisme pimpinan maka semakin rendah potensi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*.

Ha5: Idealisme pimpinan berpengaruh secara negatif terhadap perilaku kecurangan/*fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menurut Widayat (2014) idealisme pimpinan yang baik dengan sistem akan menentukan individu yang bekerja didalamnya menjadi baik meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut kurang baik, namun sebaliknya apabila idealisme pimpinannya buruk dengan sistem akan menentukan individu yang bekerja didalamnya menjadi buruk meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut mempunyai kualitas dan kinerja yang bermutu dibidangnya. Idealisme pimpinan di instansi pemerintah mempunyai konsekuensi institusional sebagaicerminkan sistem perilaku individu birokrasi, sehingga idealisme pimpinan di hipotesiskan akan meningkatkan atau menurunkan perilaku *greed*, *opportunity*, *need* dan *exposes* terhadap *fraud*.

Ha6: faktor *greed* akan menurunkan perilaku *fraud* apabila tingkat idealisme pimpinan tinggi.

Ha7: faktor *opportunity* akan menurunkan perilaku *fraud* apabila tingkat idealisme pimpinan tinggi.

Ha8: faktor *need* akan menurunkan perilaku *fraud* apabila tingkat idealisme pimpinan tinggi.

Ha9: faktor *exposes* akan menurunkan perilaku *fraud* apabila tingkat idealisme pimpinan tinggi.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Studi kasus dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuisisioner dengan menggunakan skala likert dan data sekunder berupa data proses perencanaan dan penerimaan barang dan jasa yang berpotensi melakukan *fraud*. Populasi responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 10 (sepuluh) SKPD Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah (Pengguna Anggaran,

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan). Jumlah responden dari penelitian ini berjumlah 102 responden dan jumlah kuisisioner yang disebar dan kembali sebanyak 102 dengan *response rate* 97,1% dan kuisisioner yang dapat digunakan berasal dari 95 responden.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan persamaan sebagai berikut:

$$Frd = a + b_1Grd_1 + b_2Opt_2 + b_3Nd_3 + b_4Exp_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

$$Frd = a + b_1Grd_1 + b_2Opt_2 + b_3Nd_3 + b_4Exp_4 + b_5IDL P_5 + e \dots \dots \dots (2)$$

$$Frd = a + b_1Grd_1 + b_2Opt_2 + b_3Nd_3 + b_4Exp_4 + bIDL P_5 + b_6(Grd_1 + Opt_2 + Nd_3 + Exp_4) * IDLP_5 + e \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan :

Frd = *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

a = Konstanta

Grd = *Greed* (Keserakahan)

Opt = *Opportunity* (Kesempatan/Peluang)

Nd = *Need* (Kebutuhan)

Exp = *Exposes* (Tingkat Hukuman Rendah)

IDLP = Idealisme Pimpinan

e = *Error*

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif (tabel 1) menunjukkan bahwa banyaknya responden penelitian (N) adalah 95. Nilai rata-rata atau ukuran tendensi pusat menunjukkan variabel *Greed* (*Grd*) memiliki nilai rata-rata 9,09, variabel *Opportunity* (*Opt*) memiliki nilai rata-rata 9,19, variabel *Need* (*Nd*) memiliki nilai rata-rata 9,14, variabel *Exposes* (*Exp*) memiliki nilai rata-rata 8,02, variabel idealisme pimpinan (*IDLP*) memiliki nilai rata-rata 19,37, variabel *fraud* (*Frd*) memiliki nilai rata-rata 16,04.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Range	Min.	Maks.	Sum	Mean
Greed (<i>Grd</i>)	95	12	3	15	769	9.09
Opportunity (<i>Opt</i>)	95	10	5	15	873	9.19
Need (<i>Nd</i>)	95	10	5	15	868	9.14
Exposes (<i>Exp</i>)	95	10	4	14	762	8.02
Idealisme (<i>IDLP</i>)	95	24	6	30	1840	19.37
Fraud (<i>Frd</i>)	95	18	9	27	1524	16.04
Valid N (listwise)	95					

Uji Reliabilitas dan Validitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menguji *Cronbach Alpha* (α). Konstruksi atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,70 (Ghozali, 2006) (Nunnally, 1967 dalam

Ghozali, 2010). Semua instrumen variabel adalah handal atau reliabel untuk digunakan dalam pengolahan data penelitian dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
<i>Greed (Grd)</i>	0,782
<i>Opportunity (Opt)</i>	0,712
<i>Need (Nd)</i>	0,740
<i>Exposes (Exp)</i>	0,781
Idealisme Pimpinan (<i>IDLP</i>)	0,865
<i>Fraud (Frd)</i>	0,896

Uji validitas dilakukan dengan *Coefficient Correlation Pearson*. Jika nilai hitung > nilai tabel maka item pernyataan dinyatakan valid. Validitas instrumen *Greed (Grd)*, *Opportunity*

(*Opt*), *Need (Nd)* dan Idealisme Pimpinan (*IDLP*) adalah valid (tabel 3) dengan nilai *Pearson Correlation* hitung > nilai tabel masing-masing 0,2017 untuk *degree of freedom* (df) = n-2 (93).

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	Nilai <i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
a. Validitas Instrumen <i>Greed</i> (Keserakahan)			
<i>Greed (Grd)</i>	X1	0,820	Valid
	X2	0,875	Valid
	X3	0,807	Valid
b. Validitas Instrumen <i>Opportunity</i> (Kesempatan)			
<i>Opportunity (Opt)</i>	X4	0,835	Valid
	X5	0,862	Valid
	X6	0,692	Valid
c. Validitas Instrumen <i>Need</i> (Kebutuhan)			
<i>Need (Nd)</i>	X7	0,784	Valid
	X8	0,886	Valid
	X9	0,763	Valid

d. Validitas Instrumen <i>Exposes</i> (Hukuman Yang Rendah)			
<i>Exposes (Exp)</i>	X10	0,818	Valid
	X11	0,853	Valid
	X12	0.809	Valid
e. Validitas Instrumen Idealisme Pimpinan			
Idealisme Pimpinan (<i>IDLP</i>)	X13	0,711	Valid
	X14	0,815	Valid
	X15	0,779	Valid
	X16	0,717	Valid
	X17	0,818	Valid
	X18	0,798	Valid
g. Validitas Instrumen <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah			
<i>Fraud</i> Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (<i>Frd</i>)	X19	0,779	Valid
	X20	0,862	Valid
	X21	0,819	Valid
	X22	0,763	Valid
	X23	0,802	Valid
	X24	0,845	Valid

Pengujian Hipotesis

Uji asumsi klasik telah dilakukan untuk menilai kualitas data. Berdasarkan uji multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedasitas dan nomarlitas didapatkan hasil data yang digunakan dapat diuji dengan menggunakan metode MRA.

Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian hipotesis H_{a1} - H_{a9} . Untuk persamaan 1 adalah pengujian dengan variabel *Grd*, *Opt*, *Nd* dan *Exp*. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien variabel *Greed (Grd)* sebesar 0,064 dan tidak signifikan ($p=0,259 > \alpha = 0.05$). Variabel *Opportunity (Opt)* sebesar 0,076 dan tidak signifikan ($p=0,203 > \alpha = 0.05$). Variabel *Need (Nd)* sebesar 0,010 dan tidak signifikan ($p=0,869 > \alpha = 0.05$). Variabel *Exposes (Exp)* sebesar 1,711 dan signifikan ($p=0,000 < \alpha = 0.05$). Hasil untuk persamaan 2 dengan variabel *Grd*, *Opt*, *Nd*, *Exp* dan *IDLP* menginformasikan bahwa nilai koefisien variabel *Greed (Grd)* sebesar 0,073 dan tidak signifikan ($p=0,192 > \alpha = 0.05$). variabel *Opportunity (Opt)* sebesar 0,068 dan tidak signifikan ($p=0,247 > \alpha = 0.05$). variabel

Need (Nd) sebesar 0,007 dan tidak signifikan ($p=0,904 > \alpha = 0.05$). variabel *Exposes (Exp)* sebesar 1,709 dan signifikan ($p=0,00 > \alpha = 0.05$). variabel idealisme pimpinan (*IDLP*) sebesar -0,060 dan signifikan ($p=0,022 > \alpha = 0.05$).

Persamaan 3 adalah pengujian variabel *Grd*, *Opt*, *Nd*, *Exp* dan *IDLP* dengan moderasi. Nilai koefisien variabel *Greed (Grd)* sebesar 0,053 dan tidak signifikan ($p=0,662 > \alpha = 0.05$). Nilai koefisien variabel *Opportunity (Opt)* sebesar 0,050 dan tidak signifikan ($p=0,661 > \alpha = 0.05$). Nilai koefisien variabel *Need (Nd)* sebesar -0,014 dan tidak signifikan ($p=0,912 > \alpha = 0.05$). Nilai koefisien variabel *Exposes (Exp)* sebesar 1,687 dan signifikan ($p=0,000 > \alpha = 0.05$). Variabel idealisme pimpinan (*IDLP*) sebesar -0,029 dan tidak signifikan ($p=0,869 > \alpha = 0.05$). Nilai koefisien variabel idealisme pimpinan sebagai variabel moderasi sebesar 0,000 dan tidak signifikan ($p=0,852 > \alpha = 0.05$) menunjukkan bahwa variabel idealisme pimpinan gagal menjadi variabel moderasi.

Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Persamaan 1				Persamaan 2				Persamaan 3			
	Unstandardized		t	Sig.	Unstandardized		t	Sig.	Unstandardized		t	Sig.
	B	Std.			B	Std.			B	Std.		
(Constant)	1.008	.975	1.034	.304	-.108	1.066	-.102	.919	.576	3.822	.151	.881
Greed (<i>Grd</i>)	.064	.056	1.136	.259	.073	.055	1.315	.192	.053	.120	.439	.662
Opportunity (<i>Opt</i>)	.076	.060	1.283	.203	.068	.058	1.166	.247	.050	.113	.439	.661
Need (<i>Nd</i>)	.010	.058	.165	.869	.007	.056	.121	.904	-.014	.124	-.111	.912
Exposes (<i>Exp</i>)	1.711	.071	24.058	.000***	1.709	.069	24.603	.000***	1.687	.135	12.475	.000***
Idealisme					-.060	.026	-2.324	.022**	-.029	.172	-.166	.869
Pimpinan (<i>IDL</i> P)									.000	.005	-.187	.852
Interaksi												

*** sig $\alpha = 1\%$, ** $\alpha = 5\%$, * $\alpha = 10\%$

$Frd = 1,008 + 1,711 Exp$ $Frd = 0,108 + 1,709 Exp - 0,060 IDLP$ $Frd = 0,576 + 1,687 Exp$

Untuk menerima atau menolak hipotesis maka hasil uji t dan signifikansinya menjadi acuan dengan tingkat kepercayaan = 95% dan derajat kebebasan (df) = n-k-1, diperoleh df = 89 (95-5-1=89) dan nilai t_{tabel} adalah 1,9870. H_a diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan mempunyai signifikansi < 0,05 dan H_a ditolak bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan mempunyai signifikansi > 0,05. Hipotesis 1 (H_{a1}) mengekspektasikan *Greed* atau keserakahan berpengaruh secara positif terhadap perilaku *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Nilai $t_{hitung} 1,315 < t_{tabel} 1,9870$ dan signifikansi > 0,05, dengan demikian H_{a1} ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *Greed* yang tinggi tidak menjadikan tingkat *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah juga tinggi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Teori *GONE* dari Bologne (1993) yang menyebutkan bahwa *Greed* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perilaku *fraud*. Hal tersebut bisa terjadi karena penelitian ini mengambil responden dari pegawai pemerintah yang perilaku kerjanya berdasarkan pada aturan pemerintah dimana pendapatan yang bersumber dari gaji dan tunjangan beserta honorarium sifatnya sudah melekat.

Berdasarkan hasil uji t terhadap variabel *Opportunity* pada Tabel 5 nilai $t_{hitung} 1,166 < t_{tabel} 1,9870$ dan tidak signifikan maka H_{a2} tidak dapat diterima atau variabel *Opportunity* (kesempatan) tidak berpengaruh secara positif

terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah dan H_0 diterima. Tidak liniernya hasil ini dengan Teori *GONE* Bologne (1993) bahwa *Opportunity* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perilaku *fraud* disebabkan pegawai pemerintah yang perilaku kerjanya terikat aturan dimana kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* pengadaan barang/jasa semakin diminimalisir dengan pemberlakuan *e-procurement* barang dan jasa.

Hipotesis 3 (H_{a3}) ditolak karena $t_{hitung} 0,121 < t_{tabel} 1,9870$ dan tidak signifikan. Hal ini tidak sesuai dengan yang di ekspektasikan oleh Teori *GONE* Bologne (1993) bahwa *Need* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perilaku *fraud*. Hal tersebut bisa terjadi karena penelitian ini mengambil responden dari pegawai pemerintah daerah pada kota kecil seperti Kebumen yang semuanya berasal dari suku bangsa Jawa yang cenderung mempunyai falsafah hidup "*nrima ing pandum*" atau menerima pada keadaan.

Hasil untuk hipotesis 4 (H_{a4}) mendukung diterimanya Teori *GONE* Bologne (1993) bahwa *Expose* merupakan salah satu faktor penyebab tindakan *fraud* ($t_{hitung} 24,603 > t_{tabel} 1,9870$ dan signifikan). Hal ini sangat dimungkinkan karena selama ini tingkat hukuman yang diberikan bagi para kaum birokrasi yang melakukan tindakan *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah cenderung belum memberikan efek jera (Hardian,

2011). Sementara itu, hasil uji t terhadap variabel idealisme pimpinan menunjukkan $t_{hitung} 2,324 < t_{tabel} 1,9870$ tetapi signifikan pada $\alpha < 0,05$, sehingga H_{a5} diterima. Tingkat idealisme pimpinan yang semakin tinggi menjadikan tingkat *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah semakin rendah.

Hasil pengujian variabel *Grd*, *Opt*, *Nd* dan *Exp* dengan variabel moderasi ($X*Z$) pada persamaan 3 mencatat bahwa variabel *Greed* (*Grd*), variabel *Opportunity* (*Opt*), variabel *Need* (*Nd*) dan idealisme pimpinan (*IDLP*) tidak signifikan berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah ($t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi $> 0,05$). Demikian juga variabel idealisme pimpinan (*IDLP*) bukan merupakan variabel moderasi dikarenakan nilai koefisien interaksi sebesar 0,000 dan tingkat signifikansinya $0,852 > 0,05$ dan diperkuat nilai $t_{hitung} - 0,187 < 1,9870 t_{tabel}$ sehingga hipotesis 6 (H_{a6}), hipotesis 7 (H_{a7}), hipotesis 8 (H_{a8}) ditolak. Berbeda dengan variabel *exposes* (*Exp*) yang berpengaruh secara positif tetapi idealisme pimpinan (*IDLP*) tidak berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun demikian, variabel idealisme pimpinan bukan merupakan variabel moderasi sehingga hipotesis 9 (H_{a9}) ditolak. Dengan kata lain, idealisme pimpinan (*IDLP*) terbukti secara statistik gagal menjadi variabel moderasi yang berfungsi memperkuat atau memperlemah pengaruh *Greed*, *Opportunity*, *Need*, *Exposes* terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dan pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hanya variabel *Exposes* (tingkat hukuman yang rendah) yang berpengaruh dengan tanda positif dan idealisme pimpinan yang secara statistik berpengaruh dengan pola negatif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil uji hipotesis dari 4 (empat) faktor dalam Teori *GONE* hanya faktor *Exposes* (tingkat hukuman yang rendah)

yang berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah sedangkan *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), dan *Need* (kebutuhan) tidak berpengaruh secara positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan idealisme pimpinan yang digunakan sebagai variabel moderasi berdasarkan hasil pengujian hasilnya bukan merupakan variabel moderasi. Variabel idealisme pimpinan berpengaruh secara negatif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah hanya pada saat variabel tersebut tidak dijadikan sebagai variabel pemoderasi.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa adanya *Exposes* (tingkat hukuman yang rendah) dan kurangnya idealisme pimpinan akan meningkatkan potensi kecurangan/*fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan kata lain, tanpa adanya hukuman yang bisa memberikan efek jera dan pimpinan yang kurang idealis maka akan semakin banyak potensi individu didalam diri birokrasi yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa untuk melakukan perilaku curang/*fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penelitian-penelitian dimasa akan datang yang terkait dengan perilaku kecurangan/*fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diuji kembali melalui tinjauan Teori *GONE* dan idealisme pimpinan sebagai variabel moderasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Selain itu dapat pula menguji variabel-variabel lainnya yang belum diuji dalam penelitian ini seperti integritas pimpinan dan komitmen organisasional sebagai variabel moderasi.

Rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu perlu adanya inisiatif lokal untuk menerjemahkan dalam bentuk peraturan kepala daerah yang mengatur pengadaan barang/jasa. Aturan ini juga memuat hukuman kepada para pelaku tindak *fraud* pengadaan yang bisa membuat efek jera bagi para pelakunya. Penempatan pimpinan pada masing-masing instansi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

yang mengedepankan kualifikasi berdasarkan pertimbangan idealisme individu terkait, sehingga sekecil apapun tingkat *fraud* itu bisa diantisipasi sejak dini langsung dari internal pemerintah daerah itu sendiri. Selain itu, tinjauan eksternal secara umum wacana hukuman terhadap pelaku korupsi seperti pemiskinan koruptor juga layak untuk diinisiasi oleh pemerintah pusat agar para pelaku *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh negeri ini berpikir ulang untuk melakukan tindakan *fraud* pengadaan barang/jasa tanpa kecuali baik itu di jajaran birokrasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., & Albrecht, C. O. (2004). Fraud and corporate executives: Agency, stewardship and broken trust. *Journal of Forensic Accounting*, 5(1), 109-130.
- Bologna, J., Lindquist, R. J., & Wells, J. T. (1993). *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime*: Wiley New York, NY.
- Bologne, J. (1993). *Handbook on corporate fraud: Prevention, detection, and investigation*: Butterworth-Heinemann.
- Dewani, R. A., & Chariri, A. (2015). Money laundering dan keterlibatan wanita (Artis): Tantangan baru bagi auditor investigasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1-6.
- Getie Mihret, D. (2014). National culture and fraud risk: exploratory evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 12(2), 161-176.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Glover, H. D., & Aono, J. Y. (1995). Changing the model for prevention and detection of fraud. *Managerial Auditing Journal*, 10(5), 3-9.
- Hardian, I. (2011). Kasus pengadaan barang/jasa berdasarkan temuan BPK RI. *Jurnal Pengadaan, Senarai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, 1.
- Hofstede, G., & Hofstede, G. J. (2005). *Cultures and organizations: Software of the mind* (Revised and expanded 2nd edition ed.). New York: McGraw-Hill.
- Jatiningtyas, N., & Kiswara, E. (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di wilayah Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Karyono, K. (2002). Fraud auditing. *The Winners*, 3(2), 150-160.
- KPMG. (2010). Fraud and misconduct survey 2010, Australia and New Zealand. *KPMG, Sydney*.
- Musa, N., Othman, R. M., Ibrahim, D. A., & Din, I. (2012). E-government services: The formal, technical and informal components of e-fraud prevention for government agency. *International Journal of Research in Management & Technology*, 2(2), 213-219.
- Nugroho, R. S. (2015). Pengaruh implementasi sistem pengadaan secara elektronik (E-Procurement) terhadap fraud pengadaan barang/jasa pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1905-1911.
- Ramamoorti, S. (2008). The psychology and sociology of fraud: Integrating the behavioral sciences component into fraud and forensic accounting curricula. *Issues in Accounting Education*, 23(4), 521-533.
- Segon, M. (2010). Corruption as part of national culture: The disconnect between values, ethics and etiquette. *International Review of Business Research Papers*, 6(6), 259-275.
- Tappen, R. M., Davis, F., & Tradewell, G. T. (1995). Nursing leadership and management: Concepts and practice. *Journal for Nurses in Professional Development*, 11(5), 280.
- Transparency International. (2011). Transparency international corruption perceptions index 2011. Retrieved 20 Agustus, 2017, from www.transparency.org
- Transparency International. (2012). Transparency international corruption perceptions index 2012. Retrieved 20 Agustus, 2017, from www.transparency.org

- Transparency International. (2013). Transparency international corruption perceptions index 2013. Retrieved 20 Agustus, 2017, from www.transparency.org
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Audit forensik dan audit investigatif*: Jakarta: Salemba Empat.
- Vona, L. W. (2008). *Fraud risk assessment. Building A Fraud Audit Program*.
- Widayat, P. A. (2014). Kepemimpinan profetik: Rekonstruksi model kepemimpinan berkarakter keindonesiaan. *Akademika Jurnal Pemikiran Islam*, 19(1).
- Wilson, F. M. (2013). *Organizational behaviour and work: a critical introduction*: Oxford University Press.
- Zaini, M., Carolina, A., & Sstiawan, A. R. (2015). *Analisis pengaruh fraud diamond dan gone theory terhadap academic fraud (Studi kasus mahasiswa akuntansi Se-Madura)*. Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi XVIII.